

PEMETAAN BENCANA SOSIAL DAN BENCANA ALAM DI KOTA SAMARINDA

Oleh : Maskan AF dan Florentinus Sudiran

Dosen Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Abstract

Research mapping of disaster-prone areas / social conflicts in Samarinda City, East Kalimantan Province, is intended to mapping the identification of vulnerable areas of social conflict, finding out the source of the problem (root) causes of social conflict as well as solutions and recommendations for conflict prevention and cessation of various approaches, local.

Based on the description of the data presentation and the summary of the research results (problems and potential threats of conflict) at the research sites are not very different, there are some similarities of current and future conflict identification, in sequence the potential threat of conflict is more dominant in aspects of Poleksosbud, Boundaries and aspects of SARA.

Based on the description of potential disaster / conflict potentials mentioned above, alternative solutions and recommendations for preventing and stopping social conflicts in East Kalimantan include the need for synergy between the roles of government, TNI - POLRI, private sector and key figures, peace advocacy, creating and optimizing social communication based Local wisdom, identification of potential threats to social conflicts, and enforcing strict law enforcement against perpetrators of destruction / Korlap / in charge of social conflicts.

Keywords: *social conflict, natural disaster*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kecenderungan kehidupan saat ini dan yang akan datang, kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ternyata tidak dikelola dengan baik sebagai modal sosial. Malah yang terjadi adalah kemajemukan bangsa dijadikan sebagai pemicu terjadi konflik sosial, terutama menyangkut hubungan antar agama, antar suku, antar budaya/adat. Pengalaman tidak ditemukan kerukunan menunjukkan konflik besar yang pernah terjadi di Ambon dan Poso merupakan bukti dua entitas agama besar tidak menjadi modal sosial untuk perekat kebangsaan, malah menjadi pemicu konflik sosial. Konflik besar yang terjadi di Sambas, Sampit, dan daerah Kalimantan lainnya yang melibatkan dua entitas suku besar adalah bukti betapa hidup rukun dalam perbedaan etnis masih menemukan hambatan besar.

Terjadi juga potensi bencana sosial dan alam di daerah Kalimantan timur cukup tinggi (*Tribun Kalimantan timur: 8 Agustus 2012*), potensi bencana sosial dan alam tersebut antara lain, yang pertama kerusuhan antar warga dan potensi konflik lainnya. Isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) menjadi hal yang harus ditangani dan dikelola secara arif dan

bijaksana, sehingga masyarakat tidak mudah terhasut dengan berbagai isu yang menyesatkan dan tidak jelas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab (provokator). Pengalaman pahit konflik bencana sosial dan alam di beberapa daerah dan konflik lainnya karena unsur suku, agama, ras dan antar golongan jangan sampai terulang kembali.

Yang kedua adalah bencana alam yang pernah terjadi, yang saat ini terjadi harus disikapi dengan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Tanah longsor yang terjadi di Banjarnegara, Malang, Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan lain-lain di Sumatera seperti meletusnya Gunung Sinabung, di Jawa Timur meletusnya Gunung Raung dan di Ternate meletusnya Gunung Gamalama. Kekeringan di hampir 22 provinsi di Indonesia perlu segera diatasi.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa permasalahan bencana sosial dan alam, khususnya konflik sosial begitu kompleks dan dinamis, dan terus mengalami perubahan, termasuk potensi bencana sosial dan alam di wilayah Kalimantan Timur, salah satu alternatif untuk mencari solusi alternatif penanganan konflik adalah perlunya pemetaan potensi bencana sosial dan alam, khususnya di Samarinda. Demikian pula bencana alam harus dibuat pemetaan sehingga cepat mengatasinya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pemetaan potensi bencana sosial dan alam antara lain :

1. Menggambarkan identifikasi faktor-faktor penyebab (akar masalah pemicu terjadinya konflik sosial).
2. Menggambarkan identifikasi berbagai alternatif solusi, penanganan konflik sosial.
3. Menggambarkan dan menjelaskan model pemetaan potensi bencana konflik sosial, untuk menyederhanakan pemikiran dan tindakan pencegahan konflik sosial.
4. Menggambarkan proses tahapan-tahapan pekerjaan penanganan konflik di daerah.
5. Memberikan saran, masukan pencegahan dan penyelesaian konflik kepada pihak terkait lainnya tingkat pusat dan daerah.

C. Sasaran

Sasaran pemetaan daerah rawan bencana, antara lain :

1. Tokoh Masyarakat, meliputi :
 - a. Tokoh Agama
 - b. Tokoh Adat/Budaya
 - c. Tokoh Pemuda
 - d. Tokoh Wanita
2. Organisasi/relawan pelopor perdamaian, lembaga swadaya masyarakat/forum kerukunan / persatuan / komunikasi antar umat / adat/ etnis / kelompok / golongan.
3. Stake-holder dalam penanganan konflik sosial.

D. Istilah dan pengertian

Batasan pengertian konflik bencana sosial dan alam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu konflik atau kerusuhan sosial yang melibatkan dua kelompok masyarakat atau lebih, kelompok kekerabatan, komunitas, pemeluk agama tertentu yang menimbulkan banyak korban jiwa, harta benda dan mengganggu stabilitas sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh alam yang dapat menimbulkan penderitaan, kesengsaraan dan korban jiwa pada penduduk sekitarnya.

E. Faktor penyebab konflik bencana sosial dan alam dan bencana alam

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa negara Indonesia (termasuk Kalimantan timur), secara geografis maupun sosiologis, dapat dikategorikan sebagai wilayah yang rawan bencana sosial dan alam (konflik sosial) maupun bencana alam.

1. Secara sosiologis
2. Sejarah
3. Konflik Etnis
3. Fakta sosial
4. Secara geografis

Identifikasi pemicu konflik bencana sosial dan alam dari aspek keetnisan, kebudayaan, ekonomi, politik serta perpaduan diantaranya .

II. Pendekatan dan Metodologi

Beberapa pendekatan, selanjutnya dapat dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan kegiatan pemetaan potensi bencana sosial dan alam di Samarinda. Beberapa metode pendekatan yang dipakai, antara lain melalui :

A. Pendekatan

1. Sosialisasi dan Pendampingan

- a. Melakukan rapat-rapat .
- b. Melakukan sosialisasi awal kepada pihak-pihak terkait
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target survey ke lokasi rawan potensi konflik.
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap input, proses dan output dari awal pekerjaan sampai akhir.

2. Kelembagaan/Institusi Masyarakat

- a. Melakukan pendekatan terhadap lembaga.
- b. Melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh berpengaruh pada kelembagaan tersebut.
- c. Melakukan pendekatan terhadap lembaga-lembaga indikasi sebagai pemicu konflik di daerah dan pengurus organisasi tersebut.

3. Survei Lapangan dan Instansional

- a. Melakukan survei ke instansi terkait .
- b. Melakukan survei lapangan untuk mendapatkan data yang berkaitan
- c. Melakukan perhitungan jumlah lembaga/ institusi sosial.
- d. Penyebaran Kuesioner

B. Ruang lingkup penelitian

1. **Persiapan dan penjajakan kerjasama pemetaan**
2. **Pemetaan**
3. **Focus Group Discussion**

FDG (*focus discussion group*) tahap I : Diskusi tenaga ahli terkait dengan para ahli di bidangnya berkaitan dengan metodologi pelaksanaan pekerjaan dan rancangan instrument untuk mendapatkan data di lokasi pemetaan.

4. Pengumpulan Data Lapangan (Field Research : Samarinda)

Kompilasi Data

Setelah survey lapangan dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan pekerjaan studio, *collecting* data dan analisa data, menghasilkan

Produk laporan adalah: Interim Report (laporan antara), antara lain berisi:

Data primer dan data sekunder serta data pendukung lainnya.

Rancangan teknik analisa data pemetaan.

Kegiatan FDG tahap II, diskusi tenaga ahli dengan para pakar lintas SKPD berkaitan dengan data yang telah diperoleh dan teknik analisa data yang dipergunakan untuk kegiatan pemetaan daerah rawan potensi konflik di Samarinda.

5. Penyusunan dan Review Hasil Pemetaan

6. Final Report (Laporan Akhir)

Setelah laporan antara selesai, maka langkah selanjutnya adalah pertemuan Penyusunan Hasil Pemetaan Gambaran hasil analisa dan rekomendasi pemetaan daerah rawan potensi bencana sosial dan alam di Samarinda.

III. Gambaran Umum Wilayah Kota Samarinda

A. Keadaan Geografi

Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kertanegara dengan luas wilayah 718,00 km² dan terletak antara 117°03'00" Bujur Timur dan 117°18'14" Bujur Timur serta diantara 00°19'02" dan Lintang Selatan dan 00°42'34" Lintang Selatan.

Akhir tahun 2010 Kota Samarinda dibagi menjadi 10 Kecamatan yaitu, Kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Sedangkan jumlah kelurahan di Kota Samarinda sebanyak 53 Desa. Pada awal 2015, sesuai Perda Nomor 000 Tahun 2014, jumlah kelurahan dimekarkan menjadi 59 kelurahan.

B. Keadaan Iklim

Kota Samarinda yang beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yaitu adanya musim kemarau dan musim penghujan. Selain itu karena letaknya di daerah khatulistiwa maka iklim di Kota Samarinda juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat November-April dan angin Muson Timur Mei-Oktober. Namun dalam tahun-tahun terakhir ini keadaan musim kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya musim kemarau bahkan terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Kota Samarinda pada tahun 2014, Samarinda mengalami iklim panas dengan suhu udara rata-rata 27,7 oC. Suhu udara terendah 24,0oC terjadi pada bulan Januari dan tertinggi 34,0oC pada bulan Oktober. Kota Samarinda mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang relatif tinggi. Pada tahun 2014 kelembaban udara berkisar 76% sampai dengan 84 %. Sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 199,0 mm, dengan curah hujan tertinggi 448,6 mm pada bulan Desember dan terendah 49,5 mm pada bulan Juli. Persentase penyinaran matahari di Kota Samarinda rata-rata 41,6% dan jumlah hari hujan rata-rata tahun 2014 adalah 18 HH.

C. Keadaan Pemerintahan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Samarinda pada tahun 2014 sebanyak 11.133 orang, dimana sebagian besar dari mereka merupakan pegawai golongan III, yaitu sebanyak 4.592 orang. Untuk pegawai golongan IV berjumlah 3.266 orang dan PNS golongan II sebanyak 1.865 orang, sedangkan sisanya merupakan pegawai golongan I sebanyak 109 orang dan juga terdapat PTTB (Pegawai Tidak Tetap/Bulanan) sebanyak 1.301 orang.

Jumlah Desa dan Kelurahan menurut klasifikasi Desa, 2014.

Desa Swadaya berjumlah 6, sedangkan Desa Swakarsa berjumlah 53 Desa, dengan demikian jumlah Desa sebanyak 59 Desa yang terbagi kedalam 10 Kecamatan.

D. Penduduk dan Angkatan Kerja.

Penduduk Kota Samarinda dari tahun ke tahun mencatat kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Kota Samarinda sebanyak 830.676 jiwa, sebagian besar berada di Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 138.836 jiwa atau 16,71 % dari total penduduk Kota Samarinda.

Tingkat kepadatan penduduk di Kota Samarinda pada tahun 2014 adalah. Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan pola persebaran dan luas wilayahnya, terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan.

Dari sepuluh kecamatan yang ada terlihat kecamatan Samarinda Ulu memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 6.276 jiwa/km², diikuti kecamatan Samarinda Seberang 5.260 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Samarinda Utara dan Palaran yang mempunyai wilayah lebih luas, tingkat kepadatannya hanya 475 jiwa/km² dan 253 jiwa 1.157 jiwa/km².

Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100, yaitu sebesar 107,26.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin tahun 2014, Pendidikan SD 49 orang, terinci laki-laki 42 orang, dan perempuan 7 orang. Pendidikan SLTP berjumlah 140 orang, laki-laki 91 orang, dan perempuan 49 orang. Pendidikan SLTA 2.730, laki-laki 1.545 orang, dan perempuan 1.185 orang. Sarjana Muda/Diploma 1.064 orang, terinci laki-laki 606 orang, perempuan 458 orang. Sarjana berjumlah 1.428 orang, laki-laki berjumlah 744 orang, dan perempuan 684 orang. Lulusan S2 39 orang, laki-laki 20 orang, dan perempuan 19 orang. Total Pencari Kerja 5.450 orang, terdiri dari laki-laki 3.048 orang, dan perempuan 2.402 orang.

E. Pendidikan

Indikator keberhasilan pembangunan sumber daya manusia meliputi berbagai dimensi, salah satu yang penting adalah bidang pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk meningkatkan ketrampilan dan kecerdasan yang dimilikinya. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Jumlah Sekolah menurut tingkat dan status Kota Samarinda tahun 2014/2015. Taman Kanak-Kanak 250 (swasta 248, negeri 2). Sekolah Dasar 236 (negeri 172, swasta 64). Sekolah SLP/MTs 117 (negeri 48, swasta 69). SLTA/MA 101 (negeri 42, swasta 59).

Banyaknya Guru menurut tingkat pendidikan tahun 2014/2015. Guru TK 1.395 orang, Guru SD 4.333 orang, Guru SLP/MTs 2.724 orang, dan Guru SLTA/MA berjumlah 3.108 orang. Jumlah murid tingkat pendidikan tahun 2014/2015. Murid TK 12.442 siswa. Murid SD 91.939 siswa. Jumlah murid SLP/MTs 40.475 siswa, sedangkan jumlah murid SLTA/MA 35.691 siswa.

F. Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia, bila pembangunan kesehatan ingin berhasil dengan baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Pembangunan sektor kesehatan adalah bagian sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia, program kesehatan telah dimulai atau bahkan prioritas utama pada generasi berikutnya terutama ibu hamil, dan anak-anak berusia di bawah lima tahun (BALITA).

Hingga tahun 2013, Pemerintah Kota Samarinda telah membangun 21 unit Puskesmas dan 43 unit Puskesmas Pembantu.

G. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan secara merata dapat memajukan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap penurunan angka kriminal.

Angka kriminalitas khususnya tindak kejahatan di daerah Kota Samarinda meskipun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya namun angka kriminalitas khususnya tindak kejahatan di daerah ini masih cukup tinggi ini terlihat dari jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan pada Polresta Kota Samarinda.

H. Keagamaan

Kehidupan beragama di Negara Indonesia diatur sesuai pasal 29 UUD 1945 dan butir-butir Pancasila sila pertama, yang menjamin kebebasan penduduk memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kehidupan beragama senantiasa dibina dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang serasi, seimbang, dan selaras yang diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah sosial budaya sebagai dampak dari globalisasi dunia dewasa ini, yang mungkin dapat merusak mental bangsa dan menghambat kemajuan, di samping untuk membina kerukunan hidup antar umat beragama.

Jumlah rumah ibadah di Kota Samarinda tahun 2014, rumah ibadah agama Islam Masjid berjumlah 395 buah, Surau/langgar 691 buah. Rumah Ibadah Agama Kristen Gereja Protestan 127 buah, Gereja Katholik 14 buah, rumah ibadah agama hindu Pura 3 buah, rumah ibadah agama Budha Vihara 3 buah, dan rumah ibadah agama Konghucu Klenteng 1 buah.

(Sumber data BPS Kota Samarinda tahun 2015, Samarinda dalam angka)

IV. PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dilokasi kegiatan, wawancara dan jawaban responden/ informan terhadap daftar pertanyaan atau angket, berikut ini dikemukakan diuraikan penyajian data dan pembahasan pemetaan Kewaspadaan dini masyarakat di Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara dari responden / informan diperoleh deskripsi tentang indentifikasi faktor penyebab daerah rawan potensi konflik sosial di Kota Samarinda, antara lain :

1. Aspek Politik

- Kemungkinan terdapat adanya gejala potensi konflik akibat pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 yang akan datang, misalnya calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau massa pendukung calon maupun partai pengusung yang tidak siap menerima kekalahan atau mungkin dicurangi dalam proses perhitungan suara.
- Kemungkinan salah satu calon pasangan menggunakan money politik, yang berusaha memberikan uang dengan jumlah tertentu kepada para pemilih.
- Kemungkinan terdapat adanya potensi konflik Pilgub tahun depan, misalnya adanya demonstrasi, unjuk rasa dari pihak tertentu untuk kepentingan elit politik tertentu.

(Sumber: dialog kerawanan konflik sosial dgn Ding, tanggal 10 Mei 2016)

2. Aspek Sosial dan Budaya

- Terdapat adanya perubahan kebiasaan/ budaya warga salah satu etnis ketika memasuki lapangan pekerjaan, misalnya jika yang menjadi pimpinan puncak diperusahaan atau lembaga pemerintah berasal dari etnis tertentu yang sangat kental dengan kekerabatannya, maka pimpinan tersebut akan menempatkan karyawan pada posisi strategis berasal dari etnis yang sama, tentu saja hal ini akan menimbulkan kekecewaan etnis lainnya.
- Terdapat adanya ormas,OKP, LSM atau organisasi lainnya seperti Gepak, PP, Laskar tertentu, di Kota Samarinda, agak keras dalam memperjuangkan kepentingan organisasi atau elit tertentu, indikasi muncul fanatisme kedaerahan berlebihan.
- Terdapat adanya kesenjangan dan ketidakadilan layanan fasilitas umum, khususnya di Daerah pinggiran dibandingkan dengan daerah kota, misalnya air PDAM tersendat-sendat distribusinya dan kualitas air keruh, lampu listrik dari PLN sering padam (byarpet), sehingga rawan kerusakan peralatan elektronik dan kerusakan bahan-bahan makanan di lemari es.

- Kecenderungan naiknya sembako pada menjelang bulan ramadhan sampai lebaran tiba, perlu adanya campur tangan Pemerintah dengan operasi pasar, agar dapat sedikit menekan harga-harga tersebut.
- Banyaknya berdiri minimarket seperti Alfamart, Alfamedi, Indomart dll di Kota Samarinda dikhawatirkan menimbulkan konflik, hal ini mengingat jarak minimarket tersebut terlalu dekat dengan toko-toko tradisional yang menjual produk yang sama yang sudah berdiri lebih dulu.
(Sumber: dialog kerawanan konflik sosial dgn S Sis, tanggal 12 Mei 2016).
- Banyaknya kasus-kasus PHK dari Perusahaan tambang akhir-akhir ini, menyebabkan meningkatnya angka pengangguran di Kota Samarinda.
- Adanya balapan liar pada malam hari-hari tertentu menyebabkan keresahan masyarakat sekitar yang berdomisili dilakukannya balapan liar, antara lain jalan M. Yamin, dr. Sutomo, dan jalan Pahlawan.
 - ✓ Pendidikan SD, SMP sederajat, dan SMA/ sederajat waktu jam belajar mata pelajaran tertentu sangat kurang:
 - ✓ Pendidikan Budi Pekerti
 - ✓ Pendidikan Agama
 - ✓ Pendidikan karakter
 - ✓ Pendidikan wawasan kebangsaan
 - ✓ Sehingga dibutuhkan kreatifitas para kepala Sekolah, memberikan pelajaran tambahan berupa ekstrakurikuler yang relevan, untuk menambah jam pelajaran.
- Adanya moratorium penerimaan CPNS, menyebabkan keresahan pegawai tidak tetap/pegawai honor, juga menutup peluang lulusan baik SMTA/ sederajat maupun lulusan Perguruan Tinggi, dampak negatifnya angka pengangguran bertambah.
(Wawancara Bpk Sarman Disdik Kota Samarinda)
- Terdapat potensi konflik sebab ditemukannya identitas/ lambang palu arit sebagai simbol partai komunis Indonesia (PKI), zaman orde lama di beberapa kota di Indonesia, patut diwaspadai oleh aparat berwajib, dan tokoh – tokoh agama, tokoh pemuda di Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda.
- Adanya penipuan lewat telephone genggam, dan gendam lewat HP, perlu kewaspadaan terhadap penipuan tersebut.
(Wawancara dengan masyarakat tanggal 12 Mei 2016)
- Adanya peredaran Miras dan narkoba, baru-baru ini ditemukan daun ganja kering yang dikirim lewat jasa pos dari Aceh ke Samarinda seberat 2 kg. (Berita koran Tribun 18 April 2016)

3. Aspek Keetnisan/Suku

- Banyaknya suku di Kota Samarinda, ada potensi konflik antar suku, sehingga perlu terus dikembangkan komunikasi melalui forum-forum, dan perlunya pernikahan lintas suku agar terwujud putra-putri hasil pernikahan lintas suku, untuk mempererat tali persaudaraan.
- Terdapat potensi konflik karena banyaknya ormas yang mengatasnamakan suku, perlu pembinaan terus menerus dari pihak berwajib, dan Pemerintah dalam hal ini Kesbangpol, sehingga keberadaannya dapat membantu Pemerintah Kota, untuk hal yang positif.

4. Aspek Agama

- Terdapat adanya indikasi aliran sesat atau aliran menyimpang dari kelompok agama tertentu, di Kecamatan Loa Janan ajaran tasyawuf tempat ibadah para jemaah di Desa Loa Duri.

(Sumber: dialog kerawanan konflik Sosial dgn unsur Ketua MUI Kota Samarinda, tanggal 12 Mei 2016)

- Dalam rangka penanggulangan radikalisme dan terorisme, Depag Kota Samarinda harus lebih intensif memberikan penyuluhan-penyuluhan kerjasama dengan Polres melalui Babinmas, beserta Penyuluh Agama di tingkat desa-desa, untuk deteksi dini.
- Pendirian rumah ibadah agama tertentu dapat menciptakan konflik, sehingga perlu komunikasi dan kerjasama yang baik dan terus menerus, antar Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), baik di level Kota maupun Provinsi.
- Pentingnya penyuluhan agama ke lapas, Rutan, Lokalisasi, dan Lapas narkoba oleh para penyuluh agama dalam rangka memberikan pembinaan dan pendampingan.

(Wawancara dengan Bpk. Masdar Amin, Kandepag Kota Samarinda, tgl 11 Mei 2016)

5. Aspek Batas Wilayah

Tumpang tindih kepemilikan tanah yang berlokasi :

- Jalan PM Noor RT 26, RT 50
- Jalan Perjuangan RT 01
- Jalan Ring Road Sempaja-Lempake RT 36
- Jalan A Wahab Syahrani RT 02
- Jalan Padat Karya Sempaja RT 21
- Jalan Batu Cermin RT 05, 07
- Muang Dalam Lempake RT 23
- Tanah Merah Ex Tambang PT LHI RT 08, RT 04
- Sungai Siring Ex Tambang PT LHI
- Jalan Poros Pampang RT 04, RT 06, RT 05

(Sumber : data dari kecamatan Samarinda utara)

6. Aspek Geografis (Bencana Alam)

- Terdapat lokasi Banjir yang cukup parah di 16 titik Kota Samarinda jika hujan lebat lebih dari 3 jam antara lain :
 - a. Jalan DI. Panjaitan Simpang Tiga Mugirejo Kelurahan. Mugirejo
 - b. Jalan Damanhuri Sei Pinang
 - c. Jalan Gerilya Kelurahan Sei Pinang
 - d. Simpang 4 Jalan Wahid Hasim I , II, AW. Syahrani
 - e. Sempaja Utara Kelurahan Sempaja
 - f. Simpang Vorfo (Mall Lembuswana)
 - g. Jalan Surya nata Simpang Kadri Kelurahan Bukit Pinang
 - h. Jalan Pasundan Kawasan kampung jawa
 - i. Jalan Antasari Kelurahan Air Putih
 - j. Kawasan Loa Bahu Kelurahan Loa Bahu

- k. Km 1 Loajanan Kelurahan Tani Aman
 - l. Jalan Ampera Samarinda Seberang (Jembatan Mahkota II)
 - m. Jalan Rapak Dalam
 - n. HM. Rifadin Kawasan SMU Plus - RS. Muis
 - o. Jalan Ir. Sutami Pergudangan Blok C
 - p. Depan Kapolres Jl. Slamet Riadi Karang Asam
(Tribun Kaltim tanggal, 21 Januari 2016, Editor: [Dwi Hendro B](#))
- Terdapat lokasi rawan longsor di Kelurahan Selili.
 - Bahaya Kebakaran jika musim kemarau tiba, apalagi pada saat bulan Ramadhan tiba, sering kali warga lalai terhadap kompor menyala, tetapi pemilik rumah tertidur.
 - Seringnya terjadi angin kencang disertai petir dan hujan lebat.
 - Terdapat lubang-lubang eks tambang batu bara yang belum direklamasi, atau mendapatkan penanganan sebagai mana mestinya, menyebabkan korban tenggelam dan meninggal dunia beberapa waktu lalu, sebaiknya dimanfaatkan untuk budidaya kolam ikan yang dipadukan dengan peternakan unggas, dengan memperhatikan aspek keamanan lingkungan lubang, agar tidak terjadi korban yang lainnya. (Sumber: *dialog kerawanankonflik dgn masy. Samarinda, tanggal 11 Mei 2016*).
 - Terdapat adanya perusahaan yang kurang memperhatikan CSR di lingkungan sekitar serta tidak melibatkan warga sekitar perusahaan sebagai karyawan atau sejenisnya untuk bekerja di perusahaan tsb.
 - Adanya pembukaan/pengupasan lahan yang lambat tindak lanjut dan penanganannya, mengakibatkan erosi dan banjir disekitar lokasi lahan.
 - Terdapat perusahaan yang kurang memperhatikan CSR menyebabkan timbulnya kecemburuan masyarakat sekitar lokasi perusahaan.
(Sumber : *Wawancara Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda*)
 - Adanya pembukaan/pengupasan lahan yang lambat tindak lanjut dan penanganannya, mengakibatkan erosi dan banjir disekitar lokasi lahan, misalnya di Desa Loa Bakung sekitar perumahan KORPRI, sehingga menambah titik banjir di Kota Samarinda, sedikitnya terdapat lima lokasi.
(Sumber Berita *Tribun KaltimHal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pengendalian Banjir [Dinas Bina Marga dan Pengairan \(DBMP\)](#) Kota Samarinda Desy Damayanti. 29 April 2015*).

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian di Kota Samarinda menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Politik

- Potensi konflik dalam pelaksanaan pemilu adalah penggelembungan suara, pemilih ganda, kartu pemilih rusak, data kurang valid, kartu pemilih kurang, petugas pemilu kurang profesional, kartu pemilu palsu, kericuhan antara anggota partai politik atau tim saksi dengan petugas pemilu, dan jumlah pemilih melalui daftar pemilih.

- Ada potensi konflik antara elit politik yang melibatkan masa dengan tujuan menang pemilu.
- Masih terdapat adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur antara kecamatan dan Desa khususnya di pedesaan.

2. Aspek Sosial Dan Kebudayaan

- Cara pandang yang berbeda karena bermacam suku dan agama, komunitas terhadap adat istiadat orang lain.
- Pemaksaan perubahan budaya etnis tertentu ketika memasuki lapangan kerja.
- Adanya ketidakadilan sosial dan ekonomi antara masyarakat asli dan pendatang.
- Adanya kesenjangan perselisihan antara masyarakat pendatang dan asli.
- Penggunaan IPTEK yang membuat perubahan drastis dalam sistem ekonomi.
- Adanya eksploitasi dan monopoli oleh pihak tertentu terhadap hajat hidup orang banyak.
- Adanya masyarakat lokal yang terimajinalisasi karena rendahnya SDM.
- Adanya ketersinggungan dalam penguasaan lapangan pekerjaan oleh komunitas tertentu.
- Adanya peredaran minuman keras.

3. Aspek Sara

- Ada etnis tertentu menguasai ekonomi
- Adat istiadat dan sopan santun yang mulai punah

4. Aspek Rawan Bencana Alam

- Bahaya banjir di musim hujan
- Kekeringan di musim kemarau yang memicu kebakaran hutan dan pemuukiman
- Bahaya tanah longsor pada musim penghujan yang hebat.
- Bahaya serangan binatang buas seperti ular , buaya , dan babi hutan.

B. Saran – saran

1. Aspek Politik

- Agar KPU bekerja maksimal, professional, dan netral pada saat Pilgub tahun 2018
- Agar petugas pemilu bertindak tegas dan objektif
- Agar pihak keamanan bertindak tegas bila ada gejala keriuhan
- Agar petugas pemilu berkerja teliti dan cermat
- Agar pemerintah setempat antisipasi akan kemungkinan terburuk.
- Agar Panitia Pengawas Pemilu melakukan tugasnya sejak tahapan awal pendaftaran sampai pada pelaksanaan Pemilu, jika ada pelanggaran diproses sesuai peraturan atau mekanisme Undang-Undang yang berlaku.
- Agar PNS, ABRI dan POLRI bertindak Netral pada Pilkada/Pilgub mendatang.
- Agar Calon Gubernur Petahana tidak memanfaatkan asset negara untuk kepentingan kampanye Pilkada Gubernur.

2. Aspek Sosial Budaya

- Memberdayakan masyarakat lokal melalui CSR, bisnis, dan keterampilan.
- Tumpang tindih kepemilikan lahan harus diminimalisir
- Monopoli dan eksploitasi dalam bentuk apapun harus diminimalisir.
- Pemkot selalu meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM masyarakat lokal, agar tidak termarginalisasi oleh pendatang.
- Pemkot memperbanyak Pendidikan vokasional, sehingga para lulusan siap bekerja di Perusahaan-Perusahaan, namun demikian lulusan dibekali keterampilan dan kompetensi sesuai bidangnya masing-masing.
- Badan Narkotika Daerah, agar selalu memberikan penyuluhan secara berkala terhadap para siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah (SMP sederajat), dan Sekolah SMA/MA/SMK, serta para Pemuda, sehingga tidak terjerumus penyalahgunaan Miras dan Narkotika
- Untuk mempersiapkan serbuan Swalayan dan Plaza/Mall dari Perusahaan ritel modern dari luar Samarinda, misalnya Carefour, Makro, Giant, Matahari, Hero, Indomart, Alfamart dan lain-lain. Agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan pembekalan secara husus dan terus menerus, kepada para pedagang, tentang penataan ruang, barang yang dijual, ruang yang nyaman, bersih, pelayanan yang ramah, cepat serta harga yang bersaing, sehingga ketika saatnya tiba dapat bersaing dengan hadirnya perusahaan ritel modern tersebut.

3. Aspek Etnis

- Semangat berdialog akan perbedaan untuk saling menghormati
- Tidak memaksakan kehendak kepada siapapun
- Pemerintah Daerah senantiasa meningkatkan pembinaan dan dialog secara terus menerus terhadap ormas-ormas suku yang ada.
- Tidak menjadi center class (menonjolkan diri)
- Pemerintah Kota melalui Dinas Pemuda dan Olah raga, mengagendakan sekali dalam setahun untuk kunjungan banding ke daerah lain bagi Ormas Pemuda, agar wawasan dan cakrawala pandangnya berwawasan kebangsaan.

4. Aspek Bencana Alam

- Agar masyarakat disiapkan menghadapi kekeringan dan banjir
- Agar masyarakat disiapkan menghadapi bahaya kebakaran di musim kemarau.
- Pembukaan lahan oleh warga dengan jalan membakar, agar diberikan penyuluhan, bahwa tradisi tersebut bukanlah satu-satunya cara untuk mempersiapkan masa tanam.
- Pemerintah Kota agar bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran lahan yang setelah membakar ditinggal begitu saja, sehingga menyebabkan hutan dan lahan menjadi gundul, akibatnya terjadi tanah longsor, erosi lumpur mengalir ke sungai akibatnya terjadi pendangkalan.

VI. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian penyajian data, pembahasan dan ringkasan penilaian hasil skoring penelitian berkaitan dengan ancaman potensi konflik sosial, serta memperhatikan dan merespon saran/masukan yang konstruktif dari peserta Focus Discussion Group (FDG) yang dilaksanakan selama 2 (dua) kali, khususnya identifikasi potensi daerah rawan bencana sosial / konflik sosial di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, berikut ini di gambarkan solusi dan rekomendasi pencegahan, penanganan dan penghentian bencana/ konflik sosial di daerah tersebut sebagai berikut :

A. Alternatif Rekomendasi Pencegahan Bencana/Konflik Sosial

1. Sinergitas peran Pemerintah, TNI-POLRI, Swasta dan Unsur Tokoh Masyarakat

:

- Pembentukan Tim Mediasi atau sejenis satgas berasal dari unsur Kepolisian, TNI, Tokoh berpengaruh, Pengusaha dan SKPD terkait yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan, sengketa pertambangan, perkebunan, baik permasalahan lahan, ketenagakerjaan maupun dampak negatif lain dari industri perkebunan atau pertambangan.
- Mengoptimalkan peran Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) yang diketuai oleh Walikota untuk mengadakan koordinasi dengan aparat keamanan dan instansi teknis guna menemukan substansi/akar setiap permasalahan serta mendeteksi sedini mungkin situasi dan kondisi daerah dan segala aktifitas sosial kemasyarakatan yang berkembang, khususnya mengidentifikasi orang/kelompok/organisasi kemasyarakatan yang berpotensi sebagai pemicu atau pelaku kekerasan.
- Bekerjasama dengan provider komunikasi guna meredam isu SARA yang dihembuskan oleh provokator lokal maupun luar daerah.
- Mendorong adanya program CSR (*corporate social responsibility*) dari perusahaan pertambangan dan perkebunan, melaksanakan program kegiatan pencegahan konflik, program keserasian dan harmonisasi sosial, sebagai investasi sosial.

2. Advokasi Perdamaian Aspek Hukum :

- Terjadinya konflik bersentuhan dengan agama maupun antar pemeluk agama pada tahun 2015, salah satu hal mendasar adalah perlunya Revisi Peraturan Rumah Ibadah, Peraturan bersama Menteri (PBM) Nomor 8 dan 9 tahun 2006 yang mengatur masalah kerukunan agama dan pendirian rumah ibadah perlu segera di revisi mengingat terjadinya pembakaran rumah ibadah di Tolikara, Papua dan Aceh Singkil. Perlu antisipasi konflik bersentuhan dengan agama di Kalimantan Timur husunya Kota Samarinda.
- Advokasi biasanya dilakukan kepada Pemda, Kepolisian, DPRD dan lembaga negara lainnya. Advokasi memerlukan kepercayaan, otoritas, legitimasi, dan kemauan untuk mengintervensi kebijakan negara. Hal ini merupakan bagian dari upaya mengubah kebijakan agar negara atau Peraturan Daerah semakin peduli terhadap eksistensi perdamaian, terutama bagaimana negara tidak membuat kebijakan yang menyulut konflik atau tidak melindungi korban konflik.

- Mengoptimalkan peran DPRD Provinsi/ DPRD Kab/Kota untuk menerbitkan PERDA HUKUM ADAT, mengingat salah satu faktor pemicu konflik sosial adalah pemberlakuan hukum adat etnis tertentu kepada etnis lainnya bertentangan dengan hukum NKRI.
- Pengawasan intensif dan sanksi hukum yang tegas kepada mafia tanah dan mafia perizinan jika terbukti melanggar hukum yang berlaku.
- Pengawasan dan pembinaan wawasan kebangsaan kepada Ormas, OKP beratribut militerisme atau organisasi lainnya yang mengarah kepada radikalisme (kekerasan) dalam bertindak.

3. Menciptakan dan Optimalisasi Komunikasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal.

- Optimalisasi peran dan fungsi (pemberdayaan) Forum Perdamaian sampai ke desa atau kampung, seperti:
 - ✓ FKPMKT (Forum Komunikasi Antar Komponen Masyarakat)
 - ✓ FKUB (Forum Komunikasi Antar Umat Beragama) dalam rangka membangun sinergitas kerukunan antar umat beragama.
 - ✓ FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)
 - ✓ FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)
 - ✓ Forum-Forum RT (Rukun Tetangga)
 - ✓ dan forum perdamaian lainnya, yang ada didaerah bersangkutan.
- Mengembangkan solusi penyelesaian/ sengketa dengan dialog (musyawarah) salah satu cara untuk saling memahami, mencari titik temu, dan menyelesaikan permasalahan. Dimensi dasar dari kualitas partisipasi adalah kontinuitas "DIALOG" atau NEGOSIASI sampai terjadinya kesepakatan atas penyelesaian kasus konflik tertentu.

4. Pemetaan Identifikasi Ancaman Potensi Konflik Sosial

- Pembuatan peta rawan bencana dan konflik sosial Kota sampai pada tingkat Kecamatan, Kelurahan / Desa untuk dapat memonitor setiap saat perkembangan situasi dan kondisi daerah masing-masing.
- Melakukan pemetaan (mapping) nilai-nilai kearifan lokal (lokal wisdom) masing-masing etnis/ suku untuk mediasi atau resolusi konflik sosial.

B. Rekomendasi Penghentian Bencana/Konflik Sosial

1. Melaksanakan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pengrusakan/Korlap/penanggung jawab dalam konflik sosial.
2. Melokalisir kejadian agar tidak berkembang dengan cara mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, camat, Lurah/kades, dan tokoh informal lainnya.
3. Mengamankan penganut aliran sesat yang menjadi sumber konflik dan sasaran kekerasan fisik dalam konflik sosial.
4. Melaksanakan penjagaan di lokasi kejadian dan patroli zona terpadu Polres, Polsek dan Polda di bantu oleh TNI.

5. Melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kerusuhan (konflik SARA) dengan mengedepankan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jubaidi. 2010. Makalah. Mengelola Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Modal Pembangunan Daerah. Makalah disampaikan dalam rangka kegiatan penguatan akses Kearifan Lokal Daerah. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Tanggal 4 Agustus 2010.
- Ahmad Jubaidi. 2011. Peranan FKPMKT Dalam Proses Asimilasi & Rekonsiliasi Sosial Makalah disajikan : Dalam Rangka Kegiatan Penguatan Akses Kearifan Lokal Dinas Sosial Prov Kaltim Samarinda, 20 April 2011.
- Ahmad Jubaidi. 2012. Resolusi Konflik Bencana Sosial di Kalimantan Timur. Makalah Disampaikan Untuk Kegiatan Rakor Kaltim Peduli Bencana 2012 . Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Tanggal 11 September 2013.
- Ahmad Jubaidi. 2013. Makalah. Perubahan Sosial dan Konflik Sosial. Makalah Disampaikan Untuk Kegiatan Pemantapan dan Penguatan Akses Kearifan Lokal Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Sabtu, 21 September 2013.
- Laporan Rapim POLRI. Identifikasi Potensi Konflik Yang Bersumber dari SARA, Industri, Economy Gap, Masalah Ketenagakerjaan dan Dampak Industri Perkebunan Serta Penanggulangan Secara Efektif. Jakarta. 30 Januari 2013.
- Laporan Paparan Kapolda Kalimantan Timur pada Rapat Konsolidasi Kominda Diperluas se Kalimantan Timur. 21 Februari 2013.
- Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur. Potensi Konflik di Daerah Kalimantan Timur, Disampaikan Dalam Rapat Kerja Teknis. Samarinda, 9 Oktober 2012.
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial
- Samarinda dalam angka tahun 2015, Sumber data BPS Kota Samarinda